

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi saat ini semakin memainkan peran yang signifikan dalam organisasi/instansi. Hal ini ditandai dengan semakin mudahnya akses informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Penggunaan teknologi informasi ini juga tidak terlepas dari peran perangkat komputer, manajemen dan teknologi komunikasi. Ketiga perangkat ini dapat dikatakan sebagai jantung teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak dalam kehidupan masyarakat. Sejak ditemukannya komputer pada tahun 1955, peradaban dunia telah memasuki era informasi. Teknologi informasi dengan komputer sebagai alat penggeraknya telah mengubah segalanya. Pemrosesan informasi berbasis komputer mulai dikenal orang dan hingga saat ini sudah banyak *software* yang dapat digunakan orang sebagai alat pengolah data untuk menghasilkan informasi. Dibidang akuntansi, sistem pemrosesan informasi akuntansi berbasis komputer banyak ditawarkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para akuntan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu,

diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK,SAP, 2005). Sedangkan akuntabilitas itu sendiri adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK,SAP, 2005).

Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Salah satu perangkat lunak yang paling banyak digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia saat ini adalah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang

bertujuan membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sekaligus menyusun laporan keuangan daerah yang akurat, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Laporan keuangan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang akan diaudit oleh BPK-RI untuk mendapatkan opini yang menyatakan apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan/organisasi. Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan (pihak internal perusahaan), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Harahap, 2010: 105).

Sesuai dengan visi BPKP sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah

Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya *good governance*.

Sejalan dengan RPJM Tahun 2010-2014, dalam Renstra Tahun 2010-2014, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagai kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja “Meningkatnya Tingkat Opini BPK terhadap LKPD”.

Beberapa peraturan perundang-undangan menyebutkan mengenai LKPD yaitu dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 99 ayat 2, yang berbunyi: “penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan dilingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya”.

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*)

meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo bertekad meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2014 dengan mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih baik melalui peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun terakhir opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo baru pada Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kekeliruan pelaporan keuangan daerah yang selama ini menjadi temuan diharapkan bisa segera diperbaiki oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Penyajian laporan keuangan harus sesuai standar akuntansi pemerintah yang transparan dan akuntabel. Ada sejumlah kelengkapan administrasi yang kurang seperti bukti transaksi keuangan, dokumen surat perintah kerja (SPK)-nya kurang, berita acara pemeriksaan fisik, termasuk pengelolaan aset yang harus ditingkatkan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Jika itu sudah baik maka Provinsi Gorontalo akan meraih WTP. Salah satu pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan oleh BPK adalah pencatatan aset tetap per 31 Desember 2011, hal ini dikarenakan pemerintah Provinsi tidak memberikan informasi yang cukup dalam KIB sebesar Rp

383.406.100.384,63. KIB sebagai dokumen pendukung pencatatan aset tidak seluruhnya menyajikan informasi yang lengkap berupa lokasi/alamat aset maupun ukuran/luasan aset. Selain itu, catatan BPK atas LHP LKPD Pemerintah Provinsi tahun 2012 tentang penyajian data aset yang belum memadai dan belum meyakinkan. Data aset yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai aset tetap per 31 Desember 2012. Total nilai aset pemerintah provinsi ini tahun 2012 hingga mencapai 343,1 Milyar. Nilai aset ini berupa aset tetap dan sisa aset yang belum terkapitalisasi ke dalam nilai aset induk. Nilai aset tetap tersebut berupa tanah 74 persil, gedung dan bangunan 121 unit dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan 99 unit. Total aset yang tidak memiliki alamat/lokasi berjumlah 233,9 Milyar sisanya aset yang belum di kapitalisasi sebesar 109,2 Milyar (Antara Gorontalo, 12/01/14).

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak

dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006 dalam Indriasari, 2008). Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan sistem informasi yakni SIMDA Keuangan. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan sistem informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hullah, dkk (2012) menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi (2007) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap manfaat dirasakan. Pemerintah kota Palembang merasakan manfaat penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada sektor publik. Diharapkan dengan kemudahan penggunaan yang diberikan teknologi informasi, dapat berdampak pada penerimaan teknologi informasi, karena pada umumnya teknologi informasi sudah terbukti dapat memberikan kemudahan dalam membantu kegiatan di sektor publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Walaupun secara umum banyak manfaat yang ditawarkan oleh penerapan SIMDA baik itu dalam hal kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*, namun dalam tahap pengimplementasiannya juga memiliki kendala yang berhubungan dengan keterlambatan jaringan yang terganggu jika kondisi cuaca buruk, kondisi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan yang sering terinfeksi virus serta rusak yang disebabkan listrik sering padam ketika sedang mengoperasikan komputer, terbatasnya sumber daya manusia yang ada (tidak tersedianya tenaga ahli dalam memperbaiki komputer dan jaringan) menjadi dampak pada pengelolaan keuangan. Kendala ini pula yang menjadi faktor pemanfaatan SIMDA belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan

sistem informasi ini juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliani, dkk (2010) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Sistem Informasi yang diterapkan dalam suatu organisasi, maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas laporan keuangan, sehingga opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo baru pada Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan oleh salah satu pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan oleh BPK yakni pencatatan aset tetap per 31 Desember 2011.

2. Belum optimalnya penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berhubungan dengan keterlambatan jaringan, kondisi perangkat keras dan perangkat lunak yang sering terinfeksi virus serta rusak dan tidak tersedianya tenaga ahli dalam memperbaiki komputer dan jaringan menjadi dampak pada pengelolaan keuangan.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya terkait dengan penerapan sistem informasi

manajemen daerah (SIMDA) keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

1.5.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk dapat mengevaluasi penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.